Kecamatan Prambon
Kabupaten Sidoarjo

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA

KECAMATAN PRAMBON

Tahun 2022

Jl. Diponegoro No.120 Prambon,
Kec.Prambon, Kab.Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Prambon Tahun 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LAKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Prambon serta dapat diketahui apakah program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Prambon).

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing- masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LAKIP Kecamatan Prambon Tahun 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Prambon di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Prambon dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Demikian LAKIP Kecamatan Prambon dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Sidoarjo, Februari 2023
CAMAT PRAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PRAMBON SIDOARJO

FERI PRASETIYA BUDI, S.STP, M, HP
Pembina
NIP. 19790208 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR GAMBAR vi
IKHTISAR EKSEKUTIF vii

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Kedudukan 1
B. Aspek Strategis Organisasi 5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 7
A. Visi dan Misi 7
B. Tujuan dan Sasaran 8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 9
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2022 9

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 11
A. Pengukuran Kinerja 11
B. Analisis Capaian Kinerja 12
1. Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan ... 12
2. Sasaran Kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum 24
C. Realisasi Anggaran 33
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40
1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40

BAB IV : PENUTUP 42
A. Kesimpulan 40
B. Pemecahan Masalah 43

LAMPIRAN - LAMPIRAN
BERITA ACARA REVIEW LAKIP 44

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Ikhtisar Eksekutif....vi
Tabel A.2 Kategori Pencapaian Indikator Tujuan vii
Tabel A.3 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran vii
Tabel 1.1 Data ASN Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 3
Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Umur 3
Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.... 4
Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah 5
Tabel 2.1 Penjabaran Misi RPJMD Kab.Sidoarjo yang diampu Kecamatan Prambon 7
Tabel 2.2 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan Rencana Strategis Kecamatan Prambon 8
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022....9
Tabel 2.4 Rincian Anggaran pada Tahun 2022 9
Tabel 3.1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja 12
Tabel 3.2 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja.... 13
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2022 13
Tabel 3.4 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Kesatu Beserta Definisi Operasional....14
Tabel 3.5 Perbadingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur 18
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Sejenis 18
Tabel 3.7 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2022 19
Tabel 3.8 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Terhadap Taget Akhir Renstra 20
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 21
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Sasaran Kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum 26
Tabel 3.11 Permasalahan Trantibum di Kecamatan Prambon 2022 yang Telah Difasilitasi 27
Tabel 3.12 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Kedua Beserta Definisi Operasional 29
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Sejenis 30
Tabel 3.14 Perkembangan Kinerja Sasaran Kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021-2022....31
Tabel 3.15 Perkembangan Kinerja Sasaran Kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra....31
Tabel 3.16 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 32
Tabel 3.17 Realisasi Kinerja dan Keuangan....34
Tabel 3.18 Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022 41
Tabel 3.19 Efisiensi Anggaran 42
Tabel 3.20 Efisiensi Anggaran 43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Berdasarkan Umur 4

Grafik 1.2 Berdasarkan Pendidikan 4

Grafik 3.1 Realisasi Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2022 14

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Sejenis 18

Grafik 3.3 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2021-2022 19

Grafik 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Terhadap Target Akhir Renstra 20

Grafik 3.5 Realisasi Kinerja Sasaran Kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 26

Grafik 3.7 Perkembangan Kinerja Sasaran Kedua meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021-2022 31

Grafik 3.8 Perbandingan Target Jangka Menengah 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Prambon 2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented goverment), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bahan utama untuk memonitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah termasuk Kecamatan Prambon wajib menysusun LAKIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan program/kegiatan pada masing-masing OPD yang telah diselenggarakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Prambon.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2022 disampaikan sebagai berikut :

Tabel A. 1 Ikhtisar Eksekutif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,31	97,29	110,17	Sangat Berhasil
		Nilai SAKIP Kecamatan	80,1	79,54	99,30	Berhasil
		Nilai RB	27,22	32,67	120,02	Sangat Berhasil
		Nilai IPP	4,01	4,08	100,17	Sangat Berhasil
		Prosentase Serapan Anggaran	90	88,48	98,31	Berhasil
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	76	100	131,57	Sangat Berhasil

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	88,31	97,29	110,17	Sangat Berhasil

Keterangan :

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Sehingga dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran dan 6 Indikator Sasaran pada Tahun 2022 rata-rata realisasi kinerja mencapai 109,92% atau kategori Sangat Berhasil.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak satu (1) Tujuan dengan satu (1) indikator dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

Tabel A. 2 Kategori Pencapaian Indikator Tujuan

No	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran sebanyak dua (2) sasaran dengan enam (6) indikator dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

Tabel A. 3 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Sangat berhasil
2	Nilai SAKIP Kecamatan	Berhasil
3	Nilai RB	Sangat berhasil
4	Nilai IPP	Sangat Berhasil
5	Prosentase Serapan Anggaran	Berhasil
6	Prosentase Permasalahan Tramtibum yang difasilitasi	Sangat Berhasil

Kecamatan Prambon

BAB I
PENDAHULUAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

A. KEDUDUKAN

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan dan administrasi terpadu kecamatan

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRAMBON

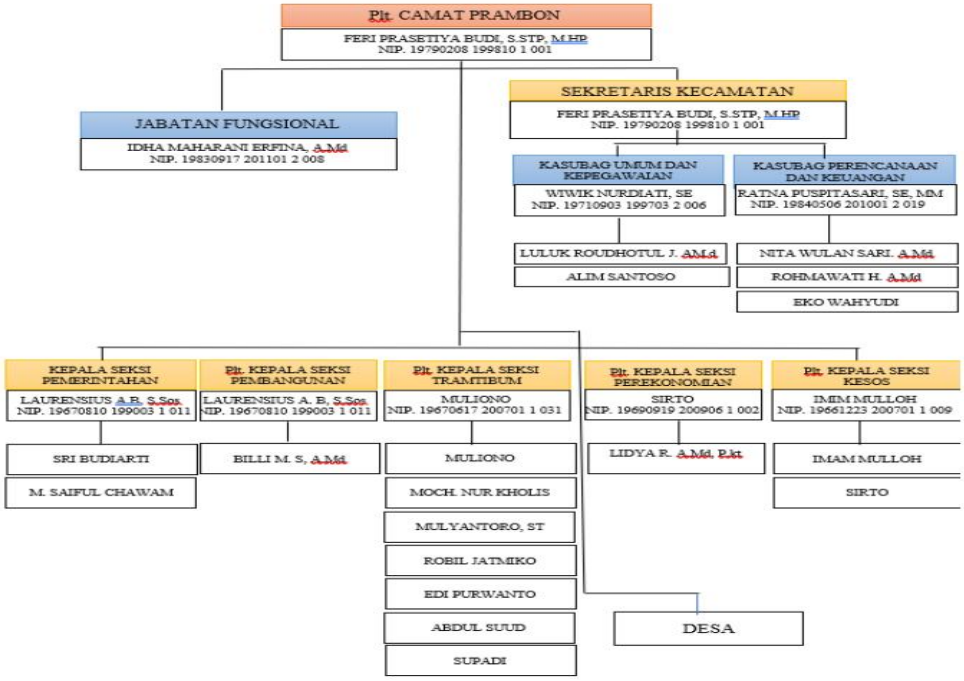

Secara garis besar, untuk struktur di bawah camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat serta kearsipan, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Kepegawaian
3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: menyiapkan penyusunan perencanaan program; mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai; menyiapkan rencana kebutuhan anggaran; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya; Aspek Strategis OPD
4) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
6) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian.
7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan.
8) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan.

Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 23 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Data ASN Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Camat	-
2	Administrator	1
3	Pengawas	3
4	Pelaksana	18
5	Jabatan Fungsional	1

Sumber : Kecamatan Prambon 2022

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Prambon per 31 Desember 2022 berjumlah 23 orang, dengan rincian 22 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk menunjang pelaksanaan kinerja Kecamatan Prambon, maka kami merekrut 13 orang pegawai Non ASN pada formasi tenaga administrasi, banpol PP, tenaga kebersihan dan tenaga persampahan.

Tabel 1.2

Pegawai Berdasarkan Umur

UMUR	TOTAL	PERSENTASE
21-30	9	25%
31-40	9	25%
41-50	9	25%
51-58	9	25%
TOTAL	**36**	**100%**

Dengan tabel diatas bahwa pada umur 21-30 Tahun berjumlah 9 orang, 31-40 Tahun berjumlah 9 orang, 41-50 Tahun berjumlah 9 orang, 51-58 Tahun berjumlah 9 orang. Untuk

tingkatan umur sama prosentasenya yaitu sebesar 25% bahwa perlu adanya pegawai baru dengan umur produktif serta tenaga ahli dalam pelayanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kinerja serta realisasi target kinerja yang telah ditetapkan.

Grafik 1.1
Berdasarkan Umur

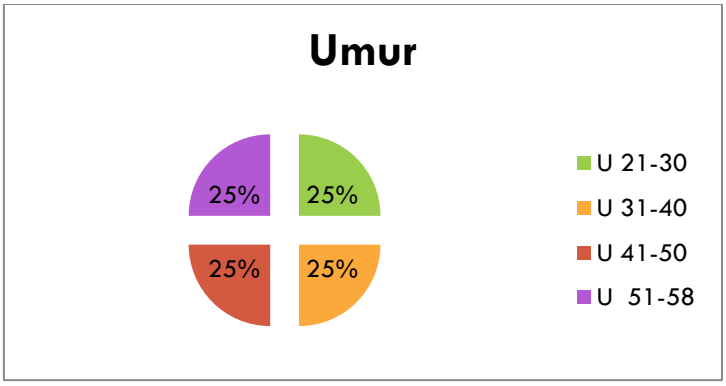

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Prambon juga didukung dengan adanya tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	TOTAL	PERSENTASE
S2	2	5,55%
S1	8	22,2%
D3	6	16,68%
SMA	19	52,79%
SMP	0	0%
SD	1	2,78%
TOTAL	**36**	**100%**

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat tingkat pendidikan di Prambon yaitu SD sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 19 orang, D3 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 2 orang. Dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMA dengan persentase 52,79%. Keterangan persentase sebagai berikut:

Grafik 1.2
Bedasarkan Pendidikan

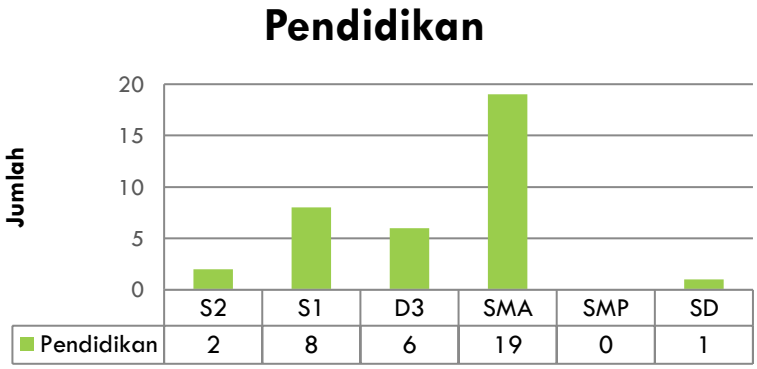

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.4

Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Prambon tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Prambon	Belum adanya informasi terkait rencana struktur pola ruang yang diinformasikan melalui website maupun ruang pelayanan Kecamatan	a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon
2	Masih adanya potensi Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang belum memiliki izin	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB b. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
3	Masih adanya potensi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP,SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP
4	Banyaknya pertumbuhan angka kelahiran setiap tahunnya	Pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat terkait pencetakan KIA	a. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah
2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR

3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB
5. Kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
6. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP,SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP
7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas Pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon

Kecamatan Prambon

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

A. VISI DAN MISI

B. TUJUAN DAN SASARAN

C. PK TAHUN 2022

D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2022

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penjabaran Misi RPJMD Kab. Sidoarjo yang diampu Kecamatan Prambon

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas Yang Mendukung Kemudahan Berusaha. *Indeks Reformasi Birokrasi*	Sasaran 2 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital. *Nilai SAKIP Kabupaten*
Misi 5 RPJMD : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Tujuan2 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketenteraman dalam masyarakat. *Indeks Kesalehan Sosial*	Sasaran 2 : Terciptanya kondisi Masyarakat yang aman, nyaman dan tentram. *Indeks Rasa Aman*

RPJMD tahun 2021-2026 memiliki program prioritas kepala daerah terpilih sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan Kerja Baru ;
2. Bpjs Kesehatan Gratis Seluruh Warga ;
3. Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin ;
4. 10.000 Beasiswa Kuliah*;*
5. Insentif Plus Guru Ngaji Dan Guru Agama ;
6. Rp. 5 Juta-50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan *;*
7. Rp. 6 Juta Operasional Bagi Rt ;
8. 20.000 Umkm Naik Kelas ;
9. Penataan Kota Dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan ;
10. Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Dan Kader Posyandu;
11. Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, Dan Tenaga Honorer;
12. *Youth Center*, Bangun Pusat Kreativitas Anak Muda;
13. 2.000 Warung Rakyat Direnovasi ;
14. Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera ;
15. 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat ;

16. Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif ;
17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah ;

Dari semua program unggulan di atas, Kecamatan Prambon bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan yang akan kami dukung adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dituju. Sehingga Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

Tabel 2. 2 Keterkaitan misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan rencana strategis Kecamatan Prambon

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Kec. Prambon	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha *Indeks Reformasi Birokrasi*	Sasaran 2 : Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha *Nilai SAKIP Kabupaten*	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai SKM Kecamatan 2. Nilai SAKIP Kecamatan Prambon 3. Nilai RB 4. Nilai IPP 5. Prosentase Penyerapan Anggaran
Misi 5 RPJMD : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Tujuan2 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketenteraman dalam masyarakat. *Indeks Kesalehan Sosial*	Sasaran 2 : Terciptanya kodisi masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Prambon. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,31
		Nilai SAKIP Kecamatan	80,1
		Nilai RB	27,22
		Nilai IPP	4,01
		Serapan Anggaran	90%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	75%

Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target sangat baik (88,31) dengan dengan realisasi 97,29, dengan Capaian kinerja tahun 2022 adalah 110,16%

Pada indikator Nilai SAKIP Kecamatan dengan target 80,1, dengan pertimbangan capaian tahun lalu 0, dan target di Renstra tahun 2022 80,1, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 0,56%.

Pada indikator Nilai RB dengan target 27,22, dengan pertimbangan capaian tahun lalu 0, dan target di Renstra tahun 2022 27,22, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 5,45%.

Pada indikator Nilai IPP dengan target 4,01, dengan pertimbangan capaian tahun lalu 0, dan target di Renstra tahun 2022 4,01, realisasi sudah mencapai target, dengan hasil nilai yang sama.

Pada indikator serapan anggaran dengan target 90%, dengan pertimbangan capaian tahun lalu 0, dan target di Renstra tahun 2022 90%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 1,55%.

Pada indikator Presentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan target 75%, target di Renstra tahun 2022 75%, realisasi sudah mencapai target, dengan hasil nilai yang sama.

Catatan: Untuk capaian tahun lalu 0 karena indikator baru ada di tahun 2022.

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 6.866.706.116,- Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.267.959.326,- dengan rincian sebagai mana berikut:

Tabel 2.4

Rincian anggaran pada tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran sesudah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15.479.100	Rp 12.534.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.872.675.186	Rp 3.347.788.996
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 412.827.998	Rp 372.073.280
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 103.328.500	Rp 191.606.800
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 830.900.250	Rp 802.268050
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 214.150.000	Rp 290.670.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 342.312.500	Rp 307.025.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 80.712.500	Rp 80.712.500

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 797.177.500	Rp 722.655.000
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 22.375.000	Rp 16.400.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 84.800.000	Rp 82.000.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 35.730.082	Rp 23.650.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 54.237.500	Rp 17.575.000
Total Anggaran			**Rp 6.866.706.116**	**Rp 6.267.959.326**

Kecamatan Prambon

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

A. PENGUKURAN KINERJA

B. ANALIS CAPAIAN KINERJA

C. REALISASI ANGGARAN

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 ≤ 90	Baik
3	70,01 ≤ 80	Cukup
4	0 ≤ 70,01	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	105%	Sangat Baik
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Sangat Baik

B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

1. **Sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

   Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 105%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama yakni Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Tabel 3.3
Realisasi kinerja sasaran pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,31	97,29	110
		Nilai SAKIP Kecamatan	80,1	79,54	99,41
		Nilai RB	27,22	32,67	120
		Nilai IPP	4,01	4,08	101
		Prosentase Serapan Anggaran	90%	88,45%	98,27

Grafik 3.1

Realisasi kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2022

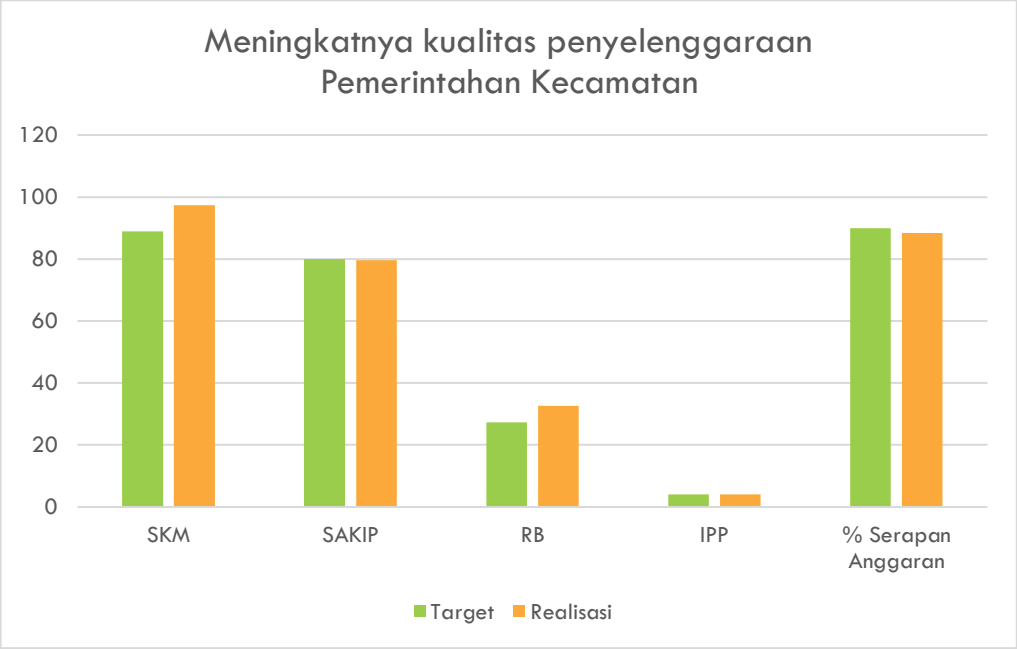

Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 (lima) indikator.

Tabel 3. 4 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Kesatu beserta definisi operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Nilai SKM Kecamatan	Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjokab.go.id/. Dengan range penilaian sebagai berikut a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 2. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/. Nilai akan otomatis *generated by system*
Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30	1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat
Nilai RB	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

		2. Mengisi LKE dari inspektorat
Nilai IPP	Indeks penilaian sebagai berikut: a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik
Prosentase Penyerapan Anggaran	$\% \, Penyerapan = \frac{Total\ Realisasi}{Total\ Anggaran} * 100\%$	Prosentase penyerapan anggaran dilihat dari laporan realisasi anggaran pada aplikasi SIKSDA siksda.sidoarjokab.go.id

Indikator pertama Nilai SKM dapat direalisasi sebesar 97,29 dari taget yang ditetapkan 88,31, untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan kualitas admin pelayanan umum;
2. Melakukan inovasi terhadap pelayanan umum agar pelayanan menjadi efisien dan fleksibel;
3. Melakukan penambahan sarana dan prasarana terkait pelayanan kepada masyarakat (menyediakan kursi roda untuk pemohon disabilitas, toilet untuk pemohon, menyediakan printer untuk foto copy apabila ada kekurangan berkas dan menyediakan fasilitas cetak mandiri KK)

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Blangko E-KTP yang tidak dapat dipastikan ketersediaannya sehingga perlu koordinasi secara intens dengan Dukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk permintaan Blangko;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengisian data pengajuan adminduk sehingga perlu di pendampingan petugas dalam pengisian.

Indikator kedua adalah Nilai SAKIP dengan realisasi sebesar 79,54 dari target sebesar 80,1. Untuk mencapai target kinerja diatas pada tahun 2022 Kecamatan

Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi antar pegawai dan pejabat, antar bidang untuk pemenuhan dokumen SAKIP
2. Melaksanakan Implementasi dalam point-point LHE SAKIP tahun sebelumnya
3. Memberikan Reward dan Punisment kepada ASN
4. Melakukan Evaluasi Internal setiap Tribulan
5. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pelatihan
6. Pengembangan karir bagi pegawai yang sudah memenuhi syarat

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Dokumen/pemenuhan data yang terlambat pengumpulannya
2. OPD masih belum mendeklarasikan ZI

Indikator ketiga adalah Nilai RB dapat direalisasikan sebesar 32,67 dari target 27,22. Untuk mencapai target kinerja diatas pada tahun 2022 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemenuhan dokumen yang terkait dengan reformasi Birokrasi (RB)
2. Melakukan Inovasi terkait reformasi Birokrasi (RB)
3. Melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi secara berkala

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemenuhan dokumen terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan

Indikator Keempat Nilai IPP dapat direalisasikan sebesar 4,08 dari target 4,01. Untuk mencapai target kinerja diatas pada tahun 2022 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan fasilitas atas sarana dan prasarana di Kecamatan Prambon

2. Monitoring evaluasi secara berkala terkait jalannya pelayanan

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan untuk pelayanan di kecamatan karena keterbatasan anggaran
2. Kompetensi pegawai (SDM Pelayanan) yang perlu ditingkatkan

Indikator Kelima Prosentase Serapan Anggaran dapat direalisasikan sebesar 88,45% dari target 90%. Untuk mencapai target kinerja diatas pada tahun 2022 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi kepada PPTK untuk melakukan penyerapan anggaran/kegiatan secara maksimal
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran secara berkala

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Kosongnya 5 (lima) pejabat Struktural sehingga untuk penyerapan TPP beban kerja dan Tukin menjadi Silpa karena sampai dengan akhir bulan Desember Pejabat Struktural belum terisi dan untuk serapan BBM Struktural juga kurang maksimal (SK Plt. baru turun bln Nopember)
2. Penyerapan Honor Pengelolan Keuangan PPKom yang hanya terserap 20% dikarenakan kurangnya pejabat struktural sehingga PPKom dirangkap oleh PA.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian ini lebih rendah/tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.5

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Provinsi Jawa Timur
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	79,54	A
		Nilai RB	32,67	A
		Nilai IPP	4,08	A-

Sumber : Kemen PANRB

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja OPD sejenis maka capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Balongbendo, maka capaian kinerja lebih baik.

Tabel 3.6

Perbandingan capaian kinerja dengan Instansi sejenis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Instansi sejenis	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,29	88,31	110	121
		Nilai SAKIP Kecamatan	79,54	80,1	99,41	103,5
		Nilai RB	32,67	32,38	120	NA
		Nilai IPP	4,08	4,10	101	NA
		Prosentase Serapan Anggaran	88,45%	90%	98,27	NA

Grafik 3.2

Perbandingan capaian kinerja dengan Instansi sejenis

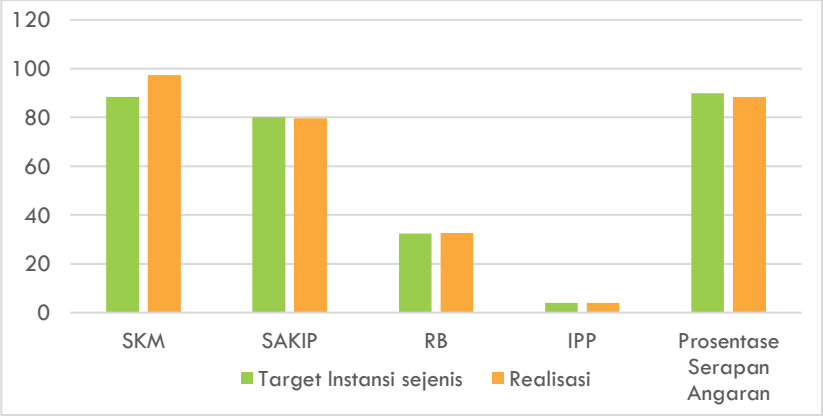

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh penambahan indikator dan meningkatnya penilaian SKM, SAKIP, RB dan IPP. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022:

Tabel 3.7
Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Prambon	95,63	97,29
		Nilai SAKIP	78,70	79,54
		Nilai RB	0	32,67
		Nilai IPP	3,90	4,08
		Prosentase Serapan Anggaran	94,28	88,45

Grafik 3.3
Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tahun 2021-2022

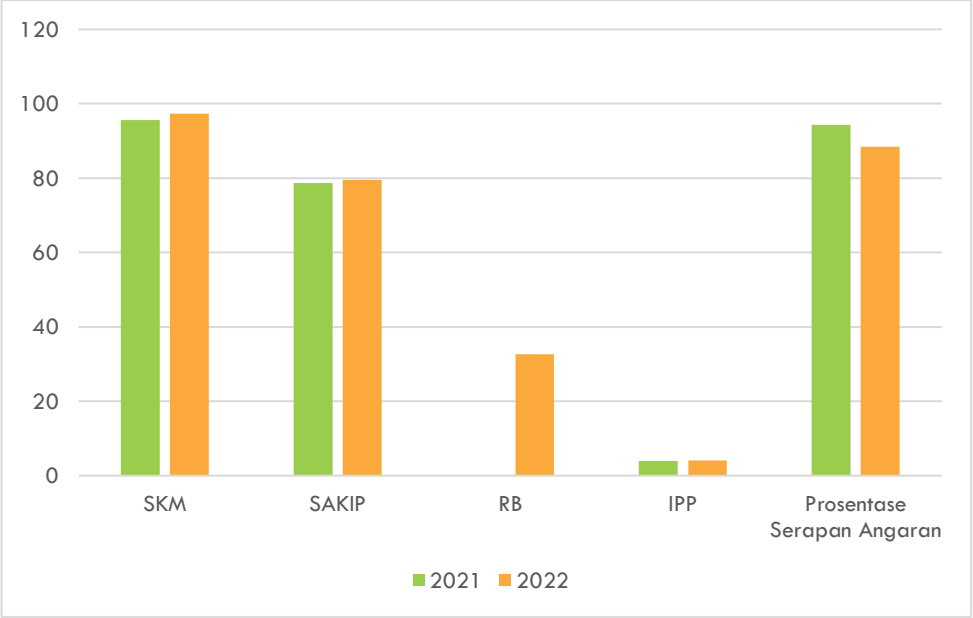

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target

jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3.8
Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Prambon	97,32	97,29	99,96
		Nilai SAKIP	80,5	79,54	99,96
		Nilai RB	32,70	32,67	99,90
		Nilai IPP	4,01	4,08	99,27
		Prosentase Serapan Anggaran	NA	88,45	NA

Grafik 3.4

Perkembangan kinerja sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra

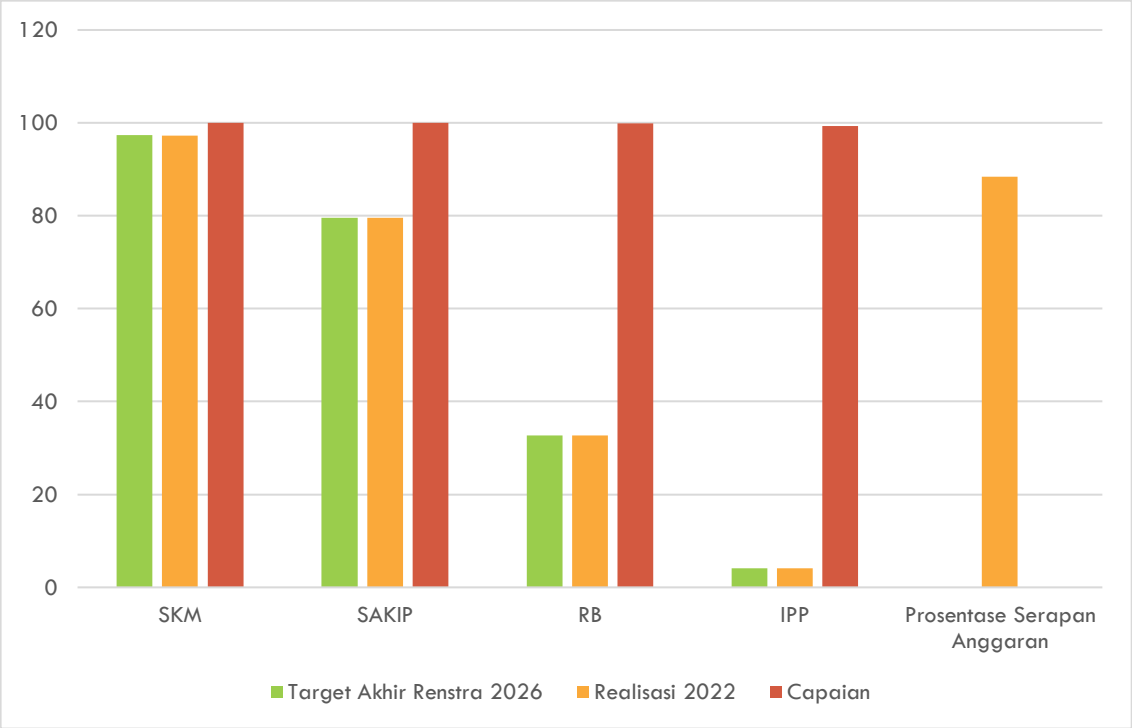

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah sebesar Rp. 6.169.559.326 dengan realisasi sebesar Rp. 5.479.475.163. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

1. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Tabel 3.9
Realisasi kinerja program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target(Rp)	Realisasi(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	5.017.941.826	4.588.310.163
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi	a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi	13.534.700	12.109.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	6.512.700	5.625.250
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	580.000	537.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen MOnev yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	6.442.000	5.947.250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	75 Persen		3.347.788.996	3.057.020.212
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	23 Org/Bulan	23 Org/Bulan	3.341.811.839	3.052.036.762
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.564.760	1.123.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran PD yang tersusun	12 laporan	12 laporan	4.412.397	3.859.950

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,31 Nilai	97,29 Nilai	372.073.280	330.523.272
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	10 Jenis	10 Jenis	8.328.650	7.395.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	52 Jenis	52Jenis	56.886.001	52.883.541
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	10.000 liter	7.355 liter	97.000.000	85.450.886
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	5.163.120	3.477.400
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang - undangan	12 Buah	12 Buah	1.560.000	1.440.000
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis bahan / material yang tersedia	36 jenis	36 jenis	37.597.428	31.743.265
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1100 kotak 1100 kotak	604 kotak 850 kotak	51.180.500	46.473.280
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	114.357.581	101.659.900
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan			191.606.800	163.477.999
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	50 unit	50 unit	53.685.150	47.750.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang diadakan	8 unit	8 unit	137.921.650	115.727.999
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 persen		802.268.050	753.958.574
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2500 surat	2030 surat	36.743.650	28.766.110
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	137.800.000	120.583.391
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar c. pengelola keuangan dan barang yang terbayar d. Jumlah tenaga Non ASN yang terbayar	a. 3 Org/bln b. 4 Org/bln c. 12 Org/bln d. 6 Org/bln	a. 3 Org/bln b. 4 Org/bln c. 12 Org/bln d. 6 Org/bln	627.724.400	604.609.073
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	31 Unit	31 Unit	290.670.000	269.301.251
		Penyediaan Jasa	a. Jumlah kendaraan	a. 2 Unit	a. 2 Unit	33.000.000	32.092.991

			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jabatan yang dipelihara dalam satu tahun b. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya dalam satu tahun	b. 2 Unit	b. 2 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara b. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	a. 17 Unit b. 17 Unit	a. 17 Unit b. 17 Unit	33.000.000	29.082.200
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas Gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang dipelihara / rehabilitasi dalam satu tahun	322,86 m2	310 m2	126.750.000	125.110.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi lainnya yang dipelihara rehabilitasi	12 Unit	12 Unit	97.920.000	83.016.060
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	a. 100 persen b. 100 persen c. 100 persen	a. 100 persen b. 100 persen c. 100 persen	1.110.392.500	854.632.800
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	19 kegiatan	21 kegiatan	307.025.000	102.120.800
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang	a. 6 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 5 Kegiatan	a. 5 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 6 Kegiatan d. 6 Kegaiatan	307.025.000	102.120.800

			perekonomian yang dilaksanakan				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	4000 berkas	7237 berkas	80.712.500	37.628.500
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. 4000 berkas b. 40 Orang	a.7237 berkas b. 40 Orang	80.712.500	37.628.500
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	a. 12 berkas b. 1 laporan c. 4 laporan	a. 0 berkas b. 1 Laporan c. 4 Laporan	722.655.000	714.883.500
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	1 Kali	1 Kali	1.912.500	1.782.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah Kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domistik yang telah dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegaiatan c. 1 Kali	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegaiatan c. 1 Kali	720.742.500	713.101.500
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100 persen	100 persen	23.650.000	22.169.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	23.650.000	22.169.000
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	23.650.000	22.169.000

			Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan				
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 persen	100 persen	17.575.000	14.363.200
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	20 Desa	20 Desa	17.575.000	14.363.200
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	a. 20 Desa b. 20 Desa	a. 20 Desa b. 20 Desa	13.350.000	11.490.200
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4.225.000	2.873.000
TOTAL							**6.169.559.326**	**5.479.475.163**

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatkan kualitas SDM agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Internal disetiap tribulan serta meningkatkan kualitas evaluasi untuk menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik
3. Melakukan Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian Keuangan pada waktu pelaksanaan kegiatan/penyerapan.
4. Menciptakan inovasi pelayanan publik yang berkualitas

2. Sasaran Kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketantraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 3.10
Realisasi kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	75%	75%	100%

Grafik 3.5

Realisasi kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator pertama Prosentase permasalahan tramtibum yang difasilitasi adalah pengukuran dari fasilitasi atas permasalahan tramtibum yang terjadi diwilayah Kecamatan Prambon. Berdasarkan tabel 3.9 diatas, indikator pertama Prosentase permasalahan tramtibum yang difasilitasi dapat direalisasi sebesar 100%.

Tabel 3.11

PERMASALAHAN TRANTIBUM DI KEC. PRAMBON 2022

YANG TELAH DIFASILITASI

No	Permasalahan	Dokumentasi
1	**Sebab:** Laporan Warga **Kejadian :** Pohon Tumbang diraya prambon (depan Koramil) **Tindak lanjut :** Anggota Trantib Prambon membantu memotong dahan pohon yang tumbang ke jalan dan ada yang membantu pengalihan arus lalu lintas **Hasil:** Pohon yang tumbang dapat segera di potong dan dipindahkan dari jalan raya dan arus lalu lintas kembali normal	Tanggal 7 Februari 2022
2	**Sebab :** Surat Desa Kedungkembar tanggal 10 Mei 2022 Nomor: 460/203/438.7.14.17/2022 perihal Permohonan **Tindak lanjut :** Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mendatangi lokasi desa tersebut bersama perangkat desa bersangkutan untuk megambil tindakan kepada ODGJ tersebut **Tindakan :** Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mengantar ODGJ tersebut ke Dinas Sosial Kab. Sidoarjo	Tanggal 10 Mei 2022
3	**Sebab :** Laporan Pemerintah Desa Wonoplintahan **Tindak Lanjut :** Anggota Trantib Kecamatan Prambon mendatangi lokasi desa tersebut dalam Kegiatan PAM Penanganan Konflik Kampanye PILKADES Desa Wonoplintahan **Hasil :** Penanganan Konflik Kampanye PILKADES Desa Wonoplintahan dapat segera tertangani	Tanggal 13 Juni 2022

4	**Sebab :** Surat Desa Jedongcangkring tanggal 24 Juni 2022 Nomor: 460/217/438.7.14.20/2022 perihal Permohonan Evakuali ODGJ **Tindak Lanjut :** Anggota Trantib Kecamatan Prambon mendatangi lokasi desa tersebut bersama perangkat desa bersangkutan untuk megambil tindakan kepada ODGJ tersebut **Hasil :** Anggota Trantib Kecamatan Prambon mengantar ODGJ tersebut ke RS. Jiwa Menur Surabaya	Tanggal 24 Juni 2022
5	**Sebab :** Surat Desa Jedongcangkring tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 460/232/438.7.14.20/2022 perihal Penjemputan ODGJ **Tindak lanjut :** Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mendatangi lokasi desa tersebut bersama perangkat desa bersangkutan untuk megambil tindakan kepada ODGJ tersebut **Hasil :** Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mengantar ODGJ tersebut ke RS. Menur Surabaya	Tanggal 13 Juli 2022
6	**Sebab :** Surat Desa Gedangrowo tanggal 20 Juli 2022 Nomor: 400/259/438.7.14.19/2022 perihal Permohonan Bantuan Satpol PP dan TKSK Kec. Perambon **Tindak Lanjut :** - Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mendatangi lokasi desa tersebut bersama perangkat desa bersangkutan untuk megambil tindakan kepada ODGJ tersebut **Hasil :** Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mengantar ODGJ tersebut ke Liposos Kab. Sidoarjo	Tanggal 20 Juli 2022
7	**Sebab :** Surat Desa Simogirang tanggal 30 September 2022 Nomor: 460/204/438.7.14.6/2022 perihal Permohonan Bantuan **Tindak Lanjut :** Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mendatangi lokasi desa tersebut bersama perangkat desa bersangkutan untuk megambil tindakan kepada Lansia terlantar tersebut **Hasil :** Anggota Trantib & TKSK Kecamatan Prambon mengantar Lansia tersebut ke Liposos Kab. Sidoarjo	Tanggal 30 Sep 2022

Tabel 3.12 Tabel Indikator Kinerja sasaran kedua beserta definisi operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran	Definisi Operasional
Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Prambon melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Prambon}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}}$

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan Patroli secara rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Melakukan penanganan pengaduan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan tramtibum Linmas di wilayah Kec. Prambon.
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimka Kecamatan (Polsek & Koramil) dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Prambon

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran kedua adalah sebagai berikut:

1. Adanya masyarakat yang masih belum memahami Perda dan Perkada sehingga banyaknya pelanggaran yang terjadi
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan, perusakan fasum dan penanganan ODGJ.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian ini tidak dapat kami bandingkan karena berbeda target. Untuk itu, kami akan membandingkan dengan instansi sejenis dalam hal ini Kecamatan Balongbendo.

Tabel 3.13

Perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kec. Prambon	Capaian instansi sejenis (Kec. Balongbendo)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%

Grafik 3.6

Perbandingan capaian kinerja dengan instansi sejenis

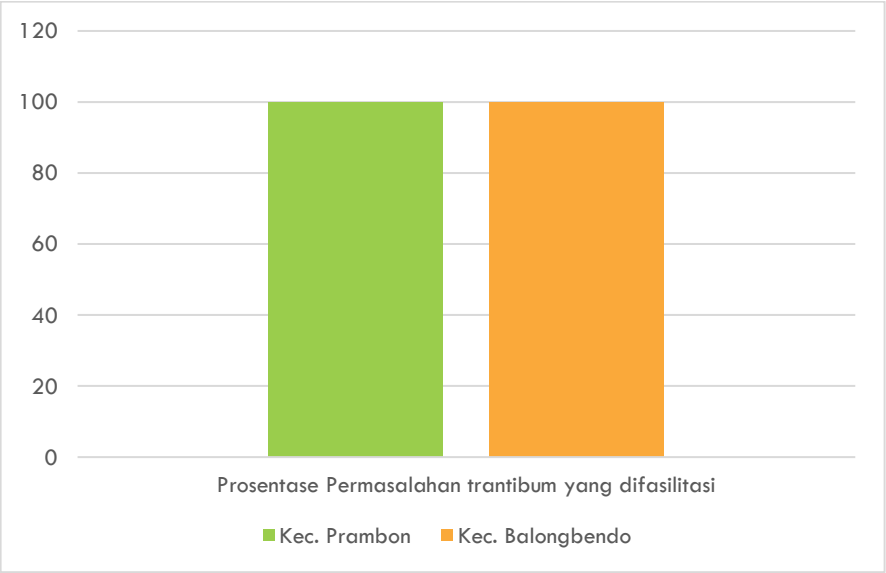

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Balongbendo, capaian kinerjanya sama.

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran pertama meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan pencapaian yang sama dari tahun sebelumnya. Namun untuk beberapa indikator kinerja tidak dapat dilakukan perbandingan nilai yang disebabkan adanya perubahan pada Sasaran Strategis yang secara langsung merubah indikator kinerja.

Tabel 3.14

Perkembangan kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Tramtibum yang difasilitasi	NA	100%

Grafik 3.7

Perkembangan kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021-2022

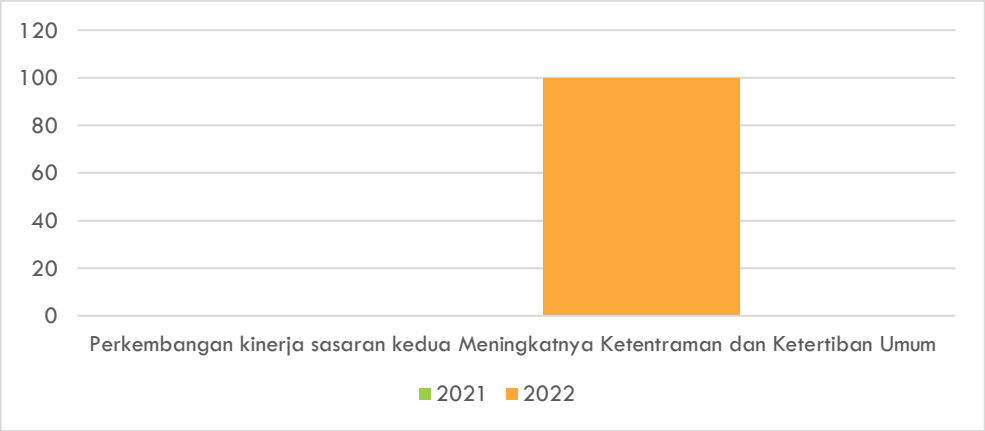

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut ini perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.15

Perkembangan kinerja sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Tramtibum yang difasilitasi	100 %	100%	100%

Grafik 3.8

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk menwujudkan sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Rp. 98.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 66.508.500. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022.

Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kedua Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022.

Tabel 3.16

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Sasaran 2: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Undikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	98.400.000	66.508.500
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	5 laporan		16.400.000	15.278.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	a. 6 Kegiatan b. 1 Kegiatan	a. 5 Kegiatan b. 1 Kegiatan	2.125.000	2.035.000

			wilayah kecamatan	yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan				
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	14.275.000	13.243.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi			82.000.000	51.230.500
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar	a. 264 laporan b. 12 permasalahan	a. 241 laporan b. 11 permasalahan	82.000.000	51.230.500
Total							**98.400.000**	**66.508.500**

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja, antara lain:

1. Mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan melaksanakan Rapat Koordinasi rutin setiap bulan dengan jajaran Forkopimka dan instansi terkait guna menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Prambon dan duduk bersama untuk menemukan solusi guna menangani permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Prambon;
2. Melakukan identifikasi secara berkala potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Prambon

C *Realisasi Anggaran*

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi kinerja dan keuangan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	98%	98%	100	5.017.941.826	4.588.310.163	91,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	4 Tahapan 4 Rekomendasi	4 Tahapan 4 Rekomendasi	100	13.534.700	12.109.500	89,47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100	6.512.700	5.625.250	86,37
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100	580.000	537.000	92,59
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen MOnev yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100	6.442.000	5.947.250	92,32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	75 Persen			3.347.788.996	3.057.020.212	91,31
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	23 Org/Bulan	23 Org/Bulan	100	3.341.811.839	3.052.036.762	91,33
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1564760	1123500	71,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran PD yang tersusun	12 laporan	12 laporan	100	4.412.397	3.859.950	87,48

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,31 Nilai	97,29 Nilai	110	372.073.280	330.443.272	88,81
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	10 Jenis	10 Jenis	100	8.328.650	7.395.000	88,79
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	52 Jenis	52Jenis	100	56.886.001	52.883.541	92,96
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	10.000 liter	7.355 liter	73, 55	97.000.000	85.450.886	88,09
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	100	5.163.120	3.477.400	67,35
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang - undangan	12 Buah	12 Buah	100	1.560.000	1.440.000	92,31
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis bahan / material yang tersedia	36 jenis	36 jenis	100	37.597.428	31.743.265	84,43
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1100 kotak 1100 kotak	604 kotak 850 kotak	54, 90 77, 27	51.180.500	46.473.280	90,80
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100	114.357.581	101.659.900	88,83
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	58 Unit	58 Unit	100	191.606.800	163.477.999	85,32
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	50 unit	50 unit	100	53.685.150	47.750.000	88,94
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang diadakan	8 unit	8 unit	100	137.921.650	115.727.999	83,91
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 persen	100 persen	100	802.268.050	753.958.574	93,98
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	2500 surat	2030 surat	81, 2	36.743.650	28.766.110	78,29
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	100	137.800.000	120.583.391	87,51

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar b. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar c. pengelola keuangan dan barang yang terbayar d. Jumlah tenaga Non ASN yang terbayar	a. 3 Org/bln b. 4 Org/bln c. 12 Org/bln d. 6 Org/bln	a. 3 Org/bln b. 4 Org/bln c. 12 Org/bln d. 6 Org/bln	100 100 100 100	627.724.400	604.609.073	96,32
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipeliharan	31 Unit	31 Unit	100	290.670.000	269.301.251	92,65
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara dalam satu tahun b. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya dalam satu tahun	a. 2 Unit b. 2 Unit	a. 2 Unit b. 2 Unit	100 100	33.000.000	32.092.991	97,25
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara b. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	a. 17 Unit b. 17 Unit	a. 17 Unit b. 17 Unit	100 100	33.000.000	29.082.200	88,13
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas Gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang dipelihara / rehabilitasi dalam satu tahun	322,86 m2	310 m2	96, 27	126.750.000	125.110.000	98,71
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi lainnya yang dipelihara rehabilitasi	12 Unit	12 Unit	100	97.920.000	83.016.060	84,78
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN			a. Persentase izin yang menjadi	a. 100 persen	a. 100 persen	100 100 100	1.110.392.500	854.632.800	76,97

	PELAYANAN PUBLIK	kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	b. 100 persen c. 100 persen	b. 100 persen c. 100 persen				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	19 kegiatan	21 kegiatan	110	307.025.000	102.120.800	33,26
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	a. 6 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 4 Kegiatan d. 5 Kegiatan	a. 5 Kegiatan b. 4 Kegiatan c. 6 Kegiatan d. 6 Kegaiatan	83,33 100 150 120	307.025.000	102.120.800	33,26
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	4000 berkas	7237 berkas	180	80.712.500	37.628.500	46,62

		Kecamatan							
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. 4000 berkas b. 40 Orang	a.7237 berkas b. 40 Orang	180 100	80.712.500	37.628.500	46,62
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	a. 12 berkas b. 1 laporan c. 4 laporan	a. 0 berkas b. 1 laporan c. 2 laporan	0 100 50	722.655.000	714.883.500	98,92
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	1 Kali	1 Kali	100	1.912.500	1.782.000	93,18
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah Kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domistik yang telah dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegaiatan c. 1 Kali	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegaiatan c. 1 Kali	100 100 100	720.742.500	713.101.500	98,40
3	PROGRAM		Persentase	100	100 persen	100	98.400.000	66.508.500	67,58

	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	persen					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	10 laporan	9 laporan	90	16.400.000	15.278.000	93,15
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan	a. 6 Kegiatan b. 1 Kegiatan	a. 5 Kegiatan b. 1 Kegiatan	83,33 100	2.125.000	2.035.000	95,76
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	14.275.000	13.243.000	92,77
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	12 permasalahan	12 permasalahan	100	82.000.000	51.230.500	62,48
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar	a. 264 laporan b. 12 permasalahan	a. 241 laporan b. 11 permasalahan	91,28 91,66	82.000.000	51.230.500	62,48
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100 persen	100 persen	100	23.650.000	22.169.000	93,74
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah kegiatan	2 kegiata	2 kegiatan	100	23.650.000	22.169.000	93,74

		Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	n					
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	23.650.000	22.169.000	93,74
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100	17.575.000	14.363.200	81,73
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	20 Desa	20 Desa	100	17.575.000	14.363.200	81,73
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	a. 20 Desa b. 20 Desa	a. 20 Desa b. 20 Desa	100 100	13.350.000	11.490.200	86,07
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	4.225.000	2.873.000	68,00
TOTAL							**6.267.959.326**	**5.543.984.308**	**88,44**

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.18

Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	105,59	85,96	**19,63**
	Nilai SAKIP			
	Nilai RB			
	Nilai IPP			
	Persentase Serapan Anggaran			
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100	67,59	**32,41**

1. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

➢ **SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN**

Indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP dan Persentase Serapan Anggaran. Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk rata - rata nilai 5 (lima) indikator dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 105,59 %, dan penyerapan anggaran sebesar 85,96 % sehingga diperoleh efisiensi sebesar 19,63%. Efisiensi tersebut disebabkan:

- Kegiatan Narasumber DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan sesuai dengan batas kewajaran untuk nominal efisiensi besarnya sebagaimana tabel dibawah ini.
- Penyerapan Honor Pengelolan Keuangan PPKom yang hanya terserap 20% dikarenakan kurangnya pejabat struktural sehingga PPKom dirangkap oleh PA untuk nominal efisiensi besarnya sebagaimana tabel dibawah ini.
- Pengadaan barang, ATK, Pengisian tabung pemadam & Bahan Kebersihan Kantor efisiensi dan sesuai kebutuhan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.19

Efisiensi Anggaran

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	Kursi rapat	53.685.150	47.750.000	5.935.150,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PC Core i7	18.424.890	17.900.000	524.890
	Printer	8.400.480	7.200.000	1.200.480
	Printer E-KTP	53.553.500	44.899.999	8.653.501
	E Ktp Reader Dan Kartu Sam	13.200.000	3.700.000	9.500.000
	Finger Scanner	33.000.000	31.000.000	2.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	26.520.000	5.304.000	21.216.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Pengisian tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00	576.000	4.424.000
Penyediaan Bahan/Material	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.597.428	31.743.265	5.854.163
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.272.501	16.915.411	2.357.090
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	268.800.000	67.200.000	201.600.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.200.000	25.200.000,	42.000.000

- **SASARAN MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

  Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi. Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan penyerapan anggaran sebesar 67,59% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 32,41%. Efisiensi dimaksud disebabkan antara lain adalah efisiensi pengadaan banner sesuai dengan harga pasar dan Kegiatan Narasumber DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan sesuai dengan batas kewajaran.

Tabel 3.20

Efisiensi Anggaran

Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Anggaran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Spanduk/ Banner	300.000	118.000	182.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.200.000	37.800.000	29.400.000

Kecamatan Prambon

BAB Iv
PENUTUP

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

A. KESIMPULAN

B. PEMECAHAN MASALAH

BAB IV
PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu 4 (dua) Sasaran Strategis dengan kategori sangat berhasil, 2 (dua) Sasaran dengan kategori berhasil.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja yang membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder.

Ada beberapa indikator masih belum tercapai diantaranya Nilai SAKIP yang tercapai nilai BB (79,54) dari target A (80,01), dan Prosentase Penyerapan Anggaran 88,48% dari target nilai 90% yang ditargetkan. Hanya indikator Nilai SKM Kecamatan, Nilai IPP, RB dan Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi yang tercapai melebihi target. Artinya dari 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator masih tercapai 66,67%. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti pencetusan koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan ketidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan instansi vertikal di wilayah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran dan instansi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada outcome, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk dibeberapa orang saja;
2. Terkait penyerapan anggaran terdapat kendala/hambatan dalam merealisasikan program dan kegiatan secara maksimal

3. Masih terdapat pelanggaran perda dan perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat

B. *Pemecahan Masalah*

Untuk mengatasi kendala yang telah di uraikan diatas, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah antara lain:

1. Meningkatkan SDM malalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui pelatihan sesuai bidangnya sehingga diharapkan mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing;
2. Melakukan evaluasi terkait serapan anggaran agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan;
3. Melakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada Tahun 2022 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023 sekaligus dengan perubahan Renstra 2021 – 2026;
4. Mendorong pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran, termasuk rencana aksi yang telah ditetapkan masing - masing seksi dan sub bagian;
5. Melakukan identifikasi secara berkala potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan Prambon.

Kecamatan Prambon

LAMPIRAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. ***Perjanjian Kinerja Tahun 2022***

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022
   https://drive.google.com/drive/folders/1ED6xITZjfpBy1d9Jd72_h1hYo4Ucyfyz

2. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Tahun 2022
   https://drive.google.com/drive/folders/1ED6xITZjfpBy1d9Jd72_h1hYo4Ucyfyz

3. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural (Eselon IV) dan Staf di Kecamatan Prambon Tahun 2022
   https://drive.google.com/drive/folders/1ED6xITZjfpBy1d9Jd72_h1hYo4Ucyfyz

B. ***Indikator Kinerja Utama Tahun 2022***
https://bit.ly/INDIKATORKINERJAPRAMBON2022

C. ***Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022***
https://bit.ly/RENCANAAKSIPRAMBON2022

D. ***Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022***
https://bit.ly/POHONKINERJAPRAMBON2022

E. ***Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022***
https://bit.ly/CAPAIANPRESTASIPRAMBON2022

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PRAMBON
JL. DIPONEGORO NO. 120 PRAMBON
Telepon. 031-8971008
Email : prambon@sidoarjokab.go.id Website : prambon.sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN PRAMBON TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, Februari 2023
CAMAT PRAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN PRAMBON SIDOARJO

FERI PRASETIYA BUDI, S.STP, M, HP
Pembina
NIP. 19790208 199810 1 001